MANHAJ AL IQTISHOD NAHDLATUL ULAMA'; *The Construction of Ahl alSunnah Wa al-Jamā'ah Paradigm in Global Economic Contestation*

Mashur Imam[1]
[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekian Insani, Situbondo, Indonesia
e-mail: [1]Sajakimam@gmail.com

Abstract

The discourse on global economic contestation originates from the conflict between socialism and capitalism. Socialism Socialism approves of state intervention in the market and breeds discrimination of people's economic rights. Meanwhile, capitalism believes in extreme market freedoms and undermines the state power in its pursuit of economic justice. Both of them proved unable to face the crisis. Nahdaltul Ulama' (NU) as the largest organization in Indonesia, seeks to play a role in the global economic contestation. This article reveals how NU Paradigm in the midst of global economic contestation? How is the construction of manhaj al Iqtishad in facing with crisis that caused by economic contestation? This research is a literature review. These two important questions are detailed using a historical document analysis approach regarding NU's role in economic contestation. The analysis is carried out by connecting the findings with the reasoning contestation that occurs. The finding conclusion is the construction of Manhaj ahl al-sunnah wa al-jamā'ah as manhaj al Iqtishad in the midst of global economic contestation.

Keywords : *Manhaj, Contestation, Ahl al Sunnah Wa al Jama'ah, Economic.*

Abstrak

Dikursus kontestasi ekonomi global bersumber dari arus pertikaian nalar sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme menyetujui intervensi kuasa negara pada pasar dan melahirkan konsep diskriminasi hak ekonomi rakyat. Sedangkan kapitalisme adalah ekstremis kebebasan pasar dan melemahkan kekuatan negara dalam mengupayakan ekonomi yang adil. Keduanya terbukti tidak membukti tidak mampu menghadapi krisis. Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai organisasi terbesar di Indonesia, berusaha untuk berperan dalam kontestasi ekonomi global yang terjadi. Penelitian ini mengungkap bagaimana nalar NU di tengah kontestasi ekonomi global? Bagaimana konstruksi manhaj al Iqtishodnya dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh kontestasi ekonomi yang terjadi? Penelitian ini berjenis kajian pustaka. Dua pertanyaan penting ini dirinci dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen sejarah tentang peran NU dalam kontestasi ekonomi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan dengan kontestasi nalar yang terjadi. Kesimpulan temuannya adalah konstruksi Manhaj ahl al-sunnah wa al-jamā'ah sebagai manhaj al Iqtishad di tengah kontestasi ekonomi global.

Keywords : Al *Manhaj, Kontestasi, Ahl al Sunnah Wa al Jama'ah, Economic.*

A. Pendahuluan

Pertikaian kapitalisme dan sosialisme terus berkembang dan tak berkesudahan. Beberapa negara berlomba-lomba melakukan inovasi kebijakan ekonomi guna menghadapi krisis akibat kontestasi yang terjadi. Ada beberapa krisis ekonomi yang disebabkan dua kelemahan nalar ekonomi kedua kelompok ini. *Pertama*, krisis karena perkembangan kapitalisme. Kapitalisme yang digagas oleh Adam Smith meyakini kebebasan pasar sebagai hal sakral yang tidak boleh diintervensi oleh kuasa apa pun termasuk negara. Nalar kebebasan menjadi dasar paradigma liberalisme ekonomi. Personal dan kelompok swasta tidak dibatasi apa pun untuk melakukan kegiatan usaha. Tindakan monopoli pun sah dilakukan. Bukan hanya itu, liberalisme juga membebaskan pemanfaatan alam. Ditambah, gerakan mesin industri yang mempermudah proses penyerapan sumber daya alam secara bebas. Akibatnya, krisis ekologi tak bisa dihindari.

Negara yang cenderung bersepakat pada nalar dasar kapitalisme, berupaya menghidupkan dikursus kebebasan dan demokrasi ekonomi pasar. Tidak jarang, perkembangan inovasinya melahirkan liberalisme ekonomi tanpa batas moral, akibat praktik-praktik monopoli ekonomi kelembagaan swasta terjadi menguat tanpa kontrol negara. Kekuasaan negara pun melemah dan pada akhirnya tidak memiliki peran dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini yang menjadi sumber krisis hingga era global saat ini ini. Callaway mengatakan "*the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets*" (Callaway, 2019). Globalisasi tujuan awalnya tidak dalam rangka kontestasi nilai atau nalar budaya, namun terjadi pada perkembangan ekonomi. Beberapa pakar seperti Waters,(2000), Cavanagh & Mander(2004), Steger, (2020), Roberts & Lamp(2021) dan lain semacamnya, telah sejak awal melakukan identifikasi pada nalar globalisme. Seluruhnya senada menjelaskan bahwa globalisasi adalah gairah akumulasi modal tanpa batasan geografis.

Kedua, krisis yang terjadi disebabkan gairah perkembangan nalar ekonomi sosialisme. Sosialisme berkembang menjadi sistem otoriter ekonomi negara. Gagasan yang dikembangkan Marx ini hanya sepakat pada kuasa negara dalam mengatur ekonomi. Mereka meyakini hanya dengan jalan penguatan kuasa negara, krisisi liberal kapitalisme dapat diatasi (Laclau, 2012). Akibat ide ini, perkembangan ekonomi tidak didasarkan pada gerak mikro masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat pun menjadi tidak berkembang, sebab perkembangan ekonomi secara mutlak dikuasai intervensi kuasa negara.

Negara yang cenderung bersepakat pada nalar kelompok sosialisme. Inovasi kebijakan dirumuskan berdasarkan pertimbangan kedaulatan negara untuk menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Tujuan luhur demikian tampak juga tidak tercapai sempurna. Konsep sosialisme melahirkan sistem komunisme ekonomi. Diperbolehkannya kekuasaan negara untuk mengintervensi pasar,

memperlemah peran hak ekonomi rakyat. Tidak heran, jika negara-negara seperti Rusia dan Korea Utara, yang memakai nalar sistem sosialisme ini dituduh banyak melanggar hak asasi ekonomi rakyat (Heo, 2021). Di titik ini mereka juga tampak menghadapi krisis yang sama.

Pertikaian ekonomi sosialisme dan kapitalisme sebenarnya bukan dikursus baru yang berkembang pada era global saat ini saja. Kontestasi dua paradigma telah lama terjadi. Di era awal kemerdekaan, banyak yang telah merespons konflik yang terjadi dengan menawarkan gagasan baru untuk menghindari krisis yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Salah satu tokoh yang cukup brilian idenya, adalah Muhammad Hatta. Ia menawarkan konsep ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi (Hatta, 2019). Gagasan cukup menarik, sebab berupaya menciptakan ekonomi berbasis kekeluargaan yang berkeadilan. Sayang, konsepsinya tidak mudah untuk dikembangkan. Liberalisme menguatkan kompetisi pasar, sehingga sistem koperasi sebagaimana dicita-ciptakan Hatta, juga tidak mampu menghadapi krisis yang terjadi. Perlemahan kedaulatan dan diskriminasi ekonomi masih sering terjadi. Mustahil membangun kewenangan perlembagaan penyimpanan di pasar liberalis.

Ide Hatta ini merupakan identitas awal bahwa nalar ekonomi negara Indonesia yang tidak menyepakati kedua nalar ekonomi kelompok besar yang bertikai, baik kapitalisme maupun komunisme. Ini juga yang menurut Nur Kholik Ridwan, menjadi dasar Abdurrahaman Wahid (Gus Dur), mantan presiden Republik Indonesia, mengatakan, “Indonesia nagara bukan-bukan”(Ridwan, 2018). Perkataan Gus Dur demikian sebenarnya menandakan dua hal yang dilematik, yakni apakah berada pada kebingungan mencari nalar yang jelas atau telah ada, namun tidak ikut kapitalisme dan sosialisme. Yang pasti, hingga saat ini, nalar ekonomi butuh didiskusikan kembali sebagai dasar pengembangan ekonomi di krisis yang terjadi.

Beberapa kelompok pakar dan bahkan organisasi kemasyarakatan banyak mengusulkan alternatif. Mereka terdorong untuk terlibat dalam pembedayaan ekonomi di era global. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh gagasan pakar ekonomi Islam dan bahkan kelompok ormas keagamaan di Indonesia. Ada banyak pakar dan gagasan dari kelompok yang peduli pada krisis yang terjadi. Kelompok keagamaan yang dimaksud, tentu yang paling banyak adalah kelompok agama Islam. Ide-ide ekonomi Islam ditawarkan oleh beberapa pakar sebagai jalan untuk menghadapi krisis. Kelompok-kelompok agama Islam terbilang sama menolak nalar kelompok ekonomi besar yang sedang berkontestasi. Misalnya HTI, menuduh kapitalisme sebagai penyebab krisis di sebuah negara (Osman, 2018) dan juga menolak komunisme karena sistem ateis(Hilmy, 2020). Sayangnya mereka ditolak dan dibubarkan di Indonesia, sebab dianggap tidak juga menentang Pancasila sebagai dasar negara(Arizona, 2019). Sehingga gagasannya mereka untuk menyelesaikan krisis akibat kontestasi yang terjadi tidak dapat diterapkan.

Selain mereka, ada juga beberapa kelompok keagamaan yang hingga saat ini tidak berseberangan dengan ideologi negara dan berhasil mengubungkan gagasan keagamaannya untuk menghadapi masalah kontestasi ekonomi global. Salah

satunya yang paling besar, adalah Nahdlatul Ulama' (NU). Organisasi ini juga berseberangan dengan nalar ekonomi komunisme. Hearman menjelaskan bahwa pembubaran komunisme di Indonesia, berhadap-hadapan dengan NU yang memiliki anggota yang sangat besar (Hearman, 2018). Wadipalapa dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa NU secara tegas memberikan wacana yang kontra pemikiran dengan komunisme (Wadipalapa, 2021a). Bukan hanya itu, NU juga secara tegas menolak kapitalisme(Khitam, 2022). Juga ada catatan bahwa penolakan NU pada kapitalisme yang paling nyata adalah keikutsertaan mereka dalam perlawanan imperialisme yang terjadi pra kemerdekaan(Ahmad, 2019) bahkan pasca atau era pertahanan kemerdekaan (Rofi'i dkk., 2022).

Peran besar NU ini, oleh beberapa peneliti, dijelaskan sebagai hal terjadi karena telah sukses memadukan nalar keagamaan kelompoknya sebagai solusi menghadapi masalah yang terjadi. Abdil Mughis dan R. Hadiz menyebut NU telah mampu menawarkan konsep "*third wave*" sebagai sistem jalan terbaik mengukur demokrasi negara dilakukan (Mudhoffir & Hadiz, 2021). Thohir menjelaskan gagasan NU sukses sebab menjalankan peran "*post-modernism*"(Thohir, 2020). Penamaan ini tentu ada sebabnya. Gustav Brown menyebut NU sebagai organisasi yang memiliki nalar logis dalam pengembangan konsensus lokal masyarakat (Brown, 2019). Nalar logis ini yang dalam perkembangannya menjadi dasar gagasan "Islam Nusantara". Islam Nusantara bukan kelompok mazhab baru, namun komitmen pengembangan nalar *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*(Kasdi, 2018).

Islam Nusantara diwacanakan sebagai penamaan dari konstruksi nalar NU yang terdiri dari berbasis pada nalar *manhaj al-fikr ahl al-sunnah wa al-jamā'ah. Manhaj* yang digagas oleh Aqil Siradj ini(Fadlullah, 2018), merupakan kekuatan nalar NU dalam menghadapi tantangan kontestasi global, dalam seluruh bidang. Selama ini *manhaj* ini hanya dikembangkan sebagai metode untuk tidak beragama secara konservatif dan menyusun gerakan anti radikalisme agama(Haikal & Habibi, 2019). Padahal sebagai sebuah nalar, semestinya tidak hanya dipakai untuk metode agama murni, namun juga berhubungan dengan budaya sosial, ekonomi dan semacamnya (Cholid, 2021). Penelitian ini berupaya merinci kembali konstruksi *manhaj al-fikr ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* pada aspek ekonomi. Kami mengistilahkan sebagai *manhaj al Iqthisod* Nahdlatul Ulama'.

B. Metode Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sejumlah gagasan dan langkah tokoh maupun kebijakan NU dalam menghadapi krisis di tengah kontestasi ekonomi global. Karena itu, jenis penelitiannya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini mengurai beberapa fakta sejarah yang ditulis oleh beberapa pakar dan mencoba memahami nalar yang terjadi berdasar pada gagasan dan ide personal yang menjadi dasar refleksi nalar yang diyakini oleh sejumlah tokoh-tokohnya.

Proses analisis dilakukan dengan cara mempertemukan sub temuan dengan beberapa kerangka dikursus teori ekonomi yang mendasari dialektika yang terjadi. Dialektika tentu adalah fakta posisi NU dalam dikursus kontestasi global. Semua

sub temuan diposisikan sebagai respons terhadap teori dialektis yang berkembang dan kemudian disusun sebagai model temuan alternatif konsepsi nalar ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan gambaran utuh tentang nalar *al Iqtishod* (ekonomi) NU, perlu terlebih memahami beberapa historis dan fenomenologi. Pembahasan ini dimulai dengan beberapa fenomena penting historis dan sejumlah gagasan tokoh NU dalam merespons kontestasi ekonomi yang terjadi. Secara garis besar pembahasan dibagi menjadi dua kelompok penting. *Pertama*, hasil inventarisir terkait kebijakan, pilihan dan fakta tindakan serta sejumlah gagasan tokoh-tokoh NU yang selama ini umum dipahami diyakini. Kedau, upaya formulasi nalar ekonomi (*manhaj al iqtishod*). Penyusunan nalar didasarkan pada hasil pembahasan pertama.

1. Nahdlatul Ulama' di Tengah Kontestasi Ekonomi Global

NU merupakan organisasi yang sejak awal memiliki posisi penting dalam peradaban masyarakat di Indonesia. Tidak mengheran, jika memiliki kekuatan dalam menggerakkan wacana, bahkan konsensus kesadaran masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. NU juga berperan sebagai kelompok yang memiliki wacana pemikiran yang menghubungkan posisi agama dan negara secara baik. Fakta umum ini yang juga dalam hubungannya dengan gerak kontestasi ekonomi saat ini. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, ada dua kelompok aliran nalar yang hingga saat ini berkembang. Untuk itu, sangat terlebih dahulu menginventarisi fakta sejarah hubungan NU dengan kedua aliran besar ini. Tentu, tujuannya demi menemukan pola-pola nalar holistik NU yang selama ini dipakai sebagai dasar posisinya dalam kontestasi ekonomi global. a. NU *Vis a Vis* Kapitalisme

Nalar kapitalisme yang digagas oleh Adam Smith melalui buku *Wealth of The Nation,* menurut Ayn Rand sebenarnya memiliki tiga dasar asumsi nalar. Ketiganya adalah *personal freedom* (kebebasan pribadi), kepentingan diri (*selfishness*) dan pasar bebas (*free market*) (Rand dkk., 1986). Jadi titik utama nalar kapitalisme berada pada pemberian kemerdekaan pada kegiatan ekonomi, agar setiap pribadi dapat optimal mengembangkan tindakan usahanya demi memenuhi kebutuhannya. Jadi kapitalisme mesti menolak penguasaan diri baik melalui pemahaman kolektivisme, altruisme atau pun mistisisme murni. Stabilitas ekonomi bagi kapitalisme tidak boleh diintervensi baik melalui aturan agama ataupun negara. Bagi kelompok ekonomi akan stabil pada dengan kebebasan itu sendiri. Distribusi kekayaan akan merata berdasar pada *the invisible hand* pasar (Lerner, 1998). Gagasan ini yang menjadi sejumlah ide dan gerakan besar di dunia, yang pada perkembangannya juga bertemu dengan nalar kelompok-kelompok agama di Indonesia, tentunya termasuk NU, sebagai organisasi terbesar.

Perjumpaan NU dengan kelompok nalar kapitalisme sebenarnya telah banyak meneliti. Beberapa penelitian ada fokus sejarah dan ada pula yang fokus yang mengkaji fenomena yang terjadi terkait dengan relasi keduanya. Dari beberapa penelitian terkait dengan sejarah NU, ada yang mendeteksi ada kedekatan dan ada pula mendeteksi adanya kontra nalar yang dikembangkan(Fealy & Bush, 2014). *Pertama*, padangan adanya *similiarity* nalar NU dengan kapitalisme. Beberapa

temuan terkait dengan demikian banyak ditulis oleh beberapa pakar yang fokus pada perjumpaan semangat nalar kapitalisme dan ajaran Islam serta NU di Indonesia. Secara umum, beberapa kajian berupaya menyambungkan nalar kapitalisme melalui sejarah dan fakta (Aminuddin & Ulfah, 2021; Bush, 2009; Hadiz & Teik, 2011) serta kesesuaian beberapa idenya dengan Islam (Ahyani dkk., 2021; Khitam, 2022; Khoiri, 2018; Usman, 2018).

Adapun kajian yang berbicara tentang kesenadaan nalar kapitalisme dengan NU melalui fakta dan sejarah, dilakukan dengan menghubungkan upaya gerakan dan kebijakan NU selama di masyarakat. Salah satu fakta yang diungkap adalah adanya solidaritas kelembagaan NU yang dibentuk di era kolonial untuk ikut serta mengembangkan ekonomi di masyarakat. Komunal yang dimaksud, umum disebut "*Nadlatut Tujjar*". NU terdiri dari *taswirul afkar*, *nahdlatul wathon* dan *nahdlatul tujjar* yang digagas oleh KH Wahab Hasbullah. Yang ketiga, dibentuk atas dasar empat hal yakni pertama, adanya budaya masyarakat dan tokoh NU yang *tajrid*, tanpa semangat perbaikan kualitas kesejahteraan hidup. *Kedua*, penguatan dari intervensi ekonomi kaum modernis Islam. *Ketiga*, kebutuhan untuk melawan dominasi ekonomi kolonial. *Keempat*, gerakan ekonomi yang tidak organisir, sedangkan advokasi masyarakat sangat dibutuhkan (Tashwirul Afkar, 2009).

Jadi, peran *Nahdlatul Tujjar* di tubuh NU sebagai komunal gerakan ekonomi ini secara garis besar dipakai untuk menjalankan fungsi pembentukan solidaritas ekonomi, dan tentu juga perlawanan terhadap intervensi kolonial yang kala itu merupakan pemerintah resmi di Indonesia. Pada aspek ekonomi, *nadlatut tujjar* merupakan jaringan swasta yang berperan sebagai pelindung dan penguat ekonomi rakyat. Kesamaan dengan kelompok kapitalisme secara paradigmatis tentu sangat jelas, gagasan pembentukannya lebih terlihat sebagai penguatan semangat kontestasi masyarakat sebagai aktor pasar yang lebih merdeka tanpa intervensi pemerintah (Jaringan Komisi Fatwa, 2004). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Martin Van Bruinessen, bahwa NU secara historis ikatan para pedagang (Bruinessen, 1994). Mereka kemudian berafiliasi untuk melindungi jaringan ekonomi masyarakat agar terlepas dari intervensi kolonial atau mampu melawan gerakan kolonial, *Verenidge Oost Company* (VOC) yang juga merupakan organisasi pedagang (Usman, 2018).

Historis perjuangan NU ini yang menyuguhkan gambaran bahwa nalar NU sebenarnya memiliki kesamaan dengan kapitalisme, sama memperjuangkan kemerdekaan ekonomi pasar. Perlawanannya kepada kolonial tidak dapat dipakai sebagai dalil penolakan terhadap kapitalisme murni. Posisinya lebih tampak sebagai bagian dari kelompok yang sadar pada kontestasi bebas pasar itu sebagaimana pandangan kapitalisme. Hal demikian ini dibuktikan dengan adanya beberapa gagasan NU dewasa yang juga berinovasi untuk ikut serta dalam kontestasi pasar bebas. Fakta ditunjukkan dari hasil kajian penelitian terkait misalnya, masih adanya upaya pemberdayaan NU pada mikro ekonomi masyarakat (Irawan, 2016; Sutisna, 2018; Suwangsit & Wathoni, 2020), upaya penguatan inovasi modern dan tekhnologi (Cleopatra, 2021; Fridiyanto dkk., 2020; Nazar & Hamid, 2022; Saraswati

& Trilaksana, 2019; Setia & Iqbal, 2021), *fundraising* zakat modern sebagai modal gerak ekonomi mikro (Setiawan & Setyorini, 2022; Soleh, 2020; Sugita dkk., 2020), dan upaya strategis dan inovasi lain untuk menghadapi era global (Damm, 2018; Esha, 2015; Imam & Baijuri, 2023; Ridwan, 2008). Seluruh gagasan tersebut tentu merupakan fakta bahwa NU menerima gerak kapitalisme hingga dewasa ini.

Apalagi jika ditelusuri secara paradigmatis ajaran agama yang dikembangkan, ada banyak gagasan yang mensenadakan penerimaan Islam pada kapitalisme. Tokoh yang banyak bicara tentang hal demikian misalnya Luthfi Assyaukani. Dia menjelaskan bahwa Islam sejak awal secara paradigmatis menerima nalar kapitalisme. Posisinya sebagai antagonistis kapitalis, hanya pada sisi gerakan kolonialisme yang tidak sesuai dengan standar etis kemanusian(A. Luthfi, 2011).

Pakar lain yang membicarakan kedekatan Islam dan kapitalisme adalah Maxime Rodinson. Dalam pandangannya, Islam merupakan ruh spirit sebagaimana yang digambarkan oleh Weber terkait dengan etika ekonomi Protestan. Bahkan menurutnya, ajaran Islam merupakan spirit terkuat dalam membangkitkan semangat ekonomi. Gagasannya paling masyhur, ia menyebut bahwa Islam lahir dari masyarakat kapitalis. Tidak mengherankan jika ada ayat dalam kitab sucinya, secara jelas menerima gairah kapitalisme dalam agama. Beberapa ayat yang dimaksud seperti *Hal adullukum 'alātijārah"*, artinya, "*Maukah engkau kuberi tahu tentang perdagangan?*"(QS.al-Shaff [61]:10) dan "*Wajāhidūbi amwālikum wa anfusikum fīsabīlillāhi*", yang artinya "*Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu*"(QS.al-Taubah [9]:41) (Habiburrahman, 2019). Jadi baginya, tidak ada alasan Islam menolak kapitalisme(Rodinson, 2007). Apalagi dalam muktamar NU terkait *ihyaul mawat,* ada kebijakan yang merekomendasi kaum nahdliyin untuk mengembangkan agraria dan negara memberikan hak pengelolaan tanah pada rakyat (PBNU, 2022).

Namun, bukan berarti gagasan di atas, tidak ada yang menentang. Ada beberapa kajian yang menolak temuan tersebut dan juga menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara Islam dengan kapitalisme. Kesimpulan ini tentu juga lahir dari beberapa fakta secara bahwa NU lahir di tengah krisis yang disebabkan oleh kapitalisme(Nasir & Ahmad, 2022). Secara politik juga masuk dalam sebagai kelompok yang paling kuat dalam menentang kebebasan global kolonial Eropa dan tentu, yang demikian telah diakui di masyarakat (Bush, 2009). Bahkan di beberapa wilayah, perlawanan pada imprelaisme kapital, secara nyata saling beropoisi dengan NU yang menjadi konsolidator gerakan masyarakat lokal (Farid, 2005). Jadi tidak mungkin, secara mutlak NU menerima kapitalisme.

Apalagi, disebutkan bahwa gerakan kapitalisme menyetujui tindakantindakan ekspolitasi, akumulasi kapital dan ekspansi ekonomi (Huda, 2016). Ketiga hal demikian tidak melanggar nilai-nilai etis dalam Islam, utamanya umum dipahami NU. Jadi bukan hanya karena adanya fakta sejarah saja, namun secara nalar juga tidak bisa disenadakan. Ekonomi Islam paling anti terhadap *interest* (riba) dan spekulasi pasar (*gharar*). Sedangkan nalar kapitalisme membuka ruang terjadinya

kedua hal tersebut (Kato, 2022). Jadi secara historis dan nalar, dalam pandangan sebagian pakar NU susah untuk menerima paradigma kapitalisme.

Sebagaimana umum dipahami, penekanan pada kebebasan subjek mikro personal manusia sebagai pelaku ekonomi sebagai yang ada pada gagasan kapitalisme, telah menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pola peralihan proses ekonomi yang digambarkan oleh Adam Smith, berhenti pada inovasi manusia pada proses industri. Artinya, tidak lagi menggantungkan kepada alam, namun pada ide manusia untuk menyerap sumber daya alam(Smith, 2018). Ide ini yang mendasar adanya eksploitasi dan melahirkan krisis ekologi (Foster, 2002).

Berdasarkan paparan di atas, kajian terdahulu yang dilakukan oleh para pakar menunjukkan hasil kajian yang dilematik. *Positioning* NU pada satu sisi menerima senada dengan kapitalisme. Namun pada sisi tampak bertentangan. Kesamaannya, adalah NU sepakat terhadap nalar kebebasan pasar. Namun, secara tegas menolak konsekuensi logis dari kebebasan tersebut. Tindakan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi ekonomi, yang bersumber dari adanya kebebasan pasar, ditolak secara tegas oleh NU. Pada sisi ini, NU sebenarnya merupakan kelompok yang satu sisi mengembangkan nalar kapitalisme dan disisi menentang dampak negatifnya. b. NU *Vis a Vis* Sosialisme/Komunisme

Sosialisme yang berkembang sebagai dalam ideologi politik, dalam hubungan dengan NU, terjadi pasang surut. Ada beberapa kajian yang menggambarkan NU sebagai basis gerakan sosialisme di Indonesia, ada kajian yang fokus menyoroti konflik keduanya. Pada aspek paradigmatis, NU memiliki hubungan baik dalam sublimasi perjuangan dan juga tidak baik dalam hal menolaknya sebagai nalar ideologis negara. Tentunya, kedau narasi berbeda ini juga didasarkan pada catatan sejarah dan wacana nalar ekonomi yang berkembang saat ini.

Pada sisi yang tidak mempertemukan NU dengan sosialisme maupun komunisme dibangun atas dasar sejarah panjang perlawanan NU dalam memperjuangkan ideologi negara. Misalnya dalam kajian yang dilakukan McGregor, berkaitan dengan konfrontasi ini, dijelaskan bahwa NU merupakan organisasi yang menjadi basis perlawanan di tingkat kultur baik dalam wacana hingga secara fisik dengan basis komunisme di Indonesia (Fealy & McGregor, 2012; McGregor, 2009). Walaupun menurut kajian yang ada, konflik mereka dipengaruhi oleh politik murni, namun tentu pertikaian itu juga berhubungan dengan wacana dan nalar agama masyarakat. Pertikaian terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah carut marut perdebatan ideologi negara. Pemuda pribumi atau dalam hal ini adalah masyarakat NU, merupakan orang yang cinta pada tradisinya (Ricklefs, 2012). Sedangkan nalar komunisme ingin membangun peradaban yang bersih dari dominasi agama dan tradisi. Mereka memperjuangkan negara tanpa intervensi kepercayaan terhadap Tuhan(Bush, 2009). Kondisi yang terus terjadi hingga era kepemerintahan saat ini (Wadipalapa, 2021).

Bukan hanya tidak sepakat pada konteks nalar hubungan agama dan negara, NU juga berbeda dengan komunisme dalam sistem demokrasi negara. Sebagaimana

diketahui bersama bahwa komunisme sangat anti pada demokrasi. Komunisme melarang kebebasan individu. Otoritas hanya dipegang oleh negara. Sehingga pengembangan kekuasaan yang disusun melalui sistem komunis, tidak memberikan ruang pada dikursus dialektika ide. Kondisi yang menyebabkan demokrasi tidak dipakai sebagai prinsip negara (Wydra, 2007). Nalar demikian yang juga ditolak oleh NU. Walaupun kedau kelompok ini pernah didekatkan oleh Soekarno, NU pada perkembangannya pengembangannya tetap melakukan resistensi pada komunisme (Hidayat dkk., 2022). Konfliknya paling terjadi di peralihan pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Konflik berdasar terjadi antara komunisme dan NU di beberapa daerah dan memakan banyak korban (Fealy & McGregor, 2010). Walaupun pada di era reformasi keduanya juga dikatakan telah terjadi perdamaian (Siddiq & Widianto, 2019), bukan berarti NU menerima tentang komunisme. Kebijakan organisasinya tetap menolak komunisme secara ideologis dan sistem kebijakan ekonomi negara (Imam & Baijuri, 2023).

Selain temuan beberapa pakar di atas, ada beberapa karya ilmiah yang juga menemukan adanya keterhubungan antara NU dengan komunisme. Walaupun ada fakta sejarah kelam pertikaian NU dan Partai Komunisme Indonesia (PKI), namun ada fakta bahwa itu terjadi tidak menolak konsepsi secara paradigmatis. Ada beberapa gerakan NU yang dibangun atas nalar sosialisme yang merupakan rahim dari sistem politik komunisme. Pada sisi ini, NU senada dengan sosialisme yang menentang seluruh sistem kapitalisme liberal yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Kemiripan terletak pada gagasan perjuangan agraria di tengah liberalisasi ekonomi (A. N. Luthfi, 2017).

Bahkan Hornbacher-Schönleber dalam kajian desertasinya menjelaskan ada pertemuan yang bisa menjadi titik kedua kelompok dapat bertemu dalam hal aspek pengembangan ekonomi. Titik tersebut adalah spirit perjuangan kaum buruh atau proletar. Nalar sosialisme dapat menjadikan nalar NU menjadi progresif dan berpihak kepada kaum lemah (Hornbacher-Schönleber, 2021). Perjuangan ekonomi masyarakat yang demikian secara konkret dilakukan salah satu kelompok aktivis Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Walaupun dianggap sebagai kelembagaan yang masih berafiliasi secara kultur, namun kelompok ini paling aktif melakukan advokasi gerakan-gerakan anti ketimpangan ekonomi. Impian mereka masyarakat Indonesia merdeka secara agraris tanpa penjarahan kapitalisme (Widayati & Suparjan, 2019). Ide demikian senada dengan apa yang digagas oleh Marx. Ia menyebut alam perlu dijaga sebab posisinya sama subjek manusia yakni sebagai *metabolistic rift* (Foster, 2000).

Walaupun FNKSDA mereka tidak secara tegas menyatakan bahwa mereka mengadopsi nalar sosialisme sebagaimana komunisme, namun beberapa mengidentifikasinya sebagai kelompok aktivis NU yang memakai nalar "kiri"(Ubaidillah, 2018). Gerakan mereka sebenarnya tidak berlebihan disebut kiri. Beberapa ajaran sosialisme yang menjadi dasar komunisme telah dianggap oleh beberapa pakar, ada dalam ajaran Islam. Hal demikian ditandai dengan lahirnya beberapa gagasan seperti nalar teologi kiri Hasan Hanafi (Hanafi, Hasan, 2004),

gerakan kiri yang dimotori para santri (Mulkhan, 2020), dan nalar kesadaran sosialisme serikat Islam pimpinan Tjokroaminoto (Makin, 2017). Seluruh fakta ini menandakan adanya hubungan baik secara paradigmatis antara dasar nalar komunisme dan NU sebagai organisasi Islam.

Berdasarkan beberapa penjelasan panjang di atas, dapat dikatakan bahwa posisi NU selama ini pada satu sisi mengembangkan dan pada sisi lain menolak kedua ideologi besar ini. Jadi sikap bagaikan dua mata sisi uang logam yang keberadaannya satu sisi merupakan hal sama dan sisi lain bertolak belakang. Penolakan atau penerimaan pada kapitalisme maupun pada sosialisme telah muncul sebagai fakta sejarah dan kontroversi nalar yang dikembangkan. Untuk memperjelas perbedaannya tabel berikut ini;

Tabel 1.1 Diferensiasi Nalar NU Dengan Kapitalisme dan Sosialisme

NU	Kapitalisme	Sosialisme
Perbedaan	• Eksploitasi Ekonomi • Ekspansi Ekonomi • Kebebasan Pasar • Liberalisasi arus ekonomi • Ketidakpastian transaksi ekonomi • Bunga Bank	• Memikirkan jangka panjang dan keadilan dalam memakai sumber ekonomi • Otoritarianisme kuasa negara • Tidak percaya pada moralitas agama • Anti Demokrasi
Persamaan	• Pengembangan Spirit Mikro Ekonomi • Naturalitik arus pasar • Penggabungan Agama Sebagai semangat ekonomi	• Advokasi masyarakat yang dirugikan arus kapitalisme(*mustad'afin*) • Penanggulangan krisis ekonomi • Intervensi kuasa negara untuk stabilitas ekonomi • Pengembangan keadilan dan kesejahteraan bersama secara merata

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan nalar NU di tengah kontestasi global saat ini. Karena adanya dua sisi hubungan yang saling berbeda tersebut, NU telah tampak memiliki nalar sendiri dalam merespons pertentangan paradigmatis ekonomi yang terjadi. Nalar demikian yang diistilahkan sebagai *manhaj al iqtishod*. Penjelasannya secara rinci dijelaskan pada sub berikutnya.

2. Konstruksi Manhaj al Iqtishod dalam Kontestasi Ekonomi Global

Manhaj al Iqtishod merupakan istilah lain dari nalar ekonomi. Pemakaian kata *Manhaj* yang diadopsi bahasa arab, merupakan istilah dari sublimasi ajaran *Ahl al Sunnah wa Al Jama'ah*. Kata *manhaj* mulai ada dalam tubuh NU sejak diwacanakan oleh K.H. Aqil Siradj, kala menjabat sebagai ketua NU. Dalam pandangannya, Aswaja tidak lagi hanya dapat dianggap sebagai sebuah mazhab, namun pokok

manhaj yang dapat menjadi arah dan dasar tindakan manusia dalam kehidupan sosial secara bijaksana. Menurutnya, aswaja *manhaj* ada tiga pokok utama yang perlu ada sebagai basis nalar kaum Nadliyyin, ketiganya adalah *tawazun, tawassuth* dan *tasammuh* (Fadlullah, 2018).

Berdasar pada gagasan demikian, NU diistilahkan sebagai "*Ahlu minhaj al-fikri ad-dînî al-musytamil 'ala syu'ûn al-hayâti wa muqtadhayâtihâ al-qâ'imi 'ala asas attawâssuth wa at-tawâzûn wa at-ta'âddul wa at-tasâmûh*". Pemaknaan ini yang menjadi dasar nalar ekonomi NU dalam kajian diistilahkan sebagai *manhaj al Iqtishod* (Hamzah dkk., 2017). Sedangkan "*al iqtshod*" tentu tentu juga bahasa arab, yang artinya ekonomi. Pemakaian memiliki makna bahwa dikursus nalar yang dibahas dibatasi atau dikontekskan pada soal aspek ekonomi. Jadi sub pembahasan ini merupakan kontekstualisasi *manhaj* Aswaja NU dalam membaca tindakan sejumlah temuan fakta historis dan gagasan yang telah dirinci di awal pembahasan.

Guna pembahasan yang sistematis, pertemuan temuan dengan gagasan yang ada perlu dibagai dalam beberapa bahasan. Jika dipandang dari tabel 1.1, ada dua yang menjadi persoalan mendasar dalam perbedaan dan persamaan nalar NU dengan kelompok besar aliran ekonomi yang bertikai. Yang pertama adalah masalah manusia antar manusia dan hubungan manusia-alam. Pada aspek hubungan manusia dan alam, tentu berkaitan dengan nalar tindakan ekonomi NU dalam hal menjaga ekologi sebagai satu-satunya sumber ekonomi. Pembahasan ini merupakan perdebatan atau dinamika nalar ekonomi awal. Sedangkan dalam hal aspek hubungan manusia dengan manusia adalah nalar ekonomi dalam kehidupan sosial manusia. Hal demikian berkenaan dengan prinsip besar yang memosisikan manusia sebagai subjek ekonomi yang memiliki kebutuhan dan berusaha memenuhinya dalam dinamika kehidupan sosialnya. Hal penting pada item yang kedua ini meliputi intervensi negara dan moral pasar. Untuk lebih rincinya, perlus dibahas satu persatu secara rinci di bawah ini;

a. Manhaj al Iqtishod dalam Hubungan Manusia dan Alam

Ada sejumlah perdebatan panjang berkaitan dengan nalar ekonomi dalam hubungan manusia dan alam. Kapitalisme sejak awal memosikan alam sebagai objek proses ekonomi. Manusia menurut mereka adalah satu-satunya aktor ekonomi yang posisinya subjek yang bebas melakukan penyerapan pada sumber daya alam. Manusia berhak melakukan eksploitasi pada alam sebagai lahan yang menyediakan kebutuhan mereka. Sosialisme sebaliknya, tidak mempercaya gagasan tersebut. Bagi mereka alam dan manusia memiliki fungsi saling menguntungkan. Marx, tokoh pendiri kelompok ini, menyebut kepercayaan demikian sebagai *metabolistic rift.* Mereka menganggap ekonomi tidak hanya tentang kepentingan manusia, namun juga kepentingan makhluk alam lain (Foster, 2000).

Konflik ini diperparah adanya krisis ekologi yang terjadi. Kapitalisme dan sosialisme saling tuduh dan melemahkan. Kapitalisme menuduh sosialisme tidak memiliki konsep tentang mengatasi krisis. Mereka hanya sibuk mengkritik tanpa memberikan rekomendasi solusi penyelesaian krisis. Sosialisme merasa tidak bertanggung jawab pada krisis yang terjadi, sebab semua masalah ekonomi

dianggap bersumber dari kapitalisme (Saito, 2017). Pada kondisi demikian ini, NU tidak berada pada sisi kapitalisme dan juga sosialisme.

Dasar nalar pada masalah yang terjadi sebenarnya bersumber dari posisi relasi manusia dan alam. NU tidak memosikan manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki berhak semena-mena pada alam sebagaimana kapitalisme. NU juga tidak meniadakan kapasitas manusia sebagai subjek ekonomi. Sebagaimana dijelaskan fakta historis yang dibahas sebelumnya. NU mengeluarkan kebijakan tentang penguatan inovasi manusia dalam mengelola dan menyerap sumber daya alam (PBNU, 2022), sekaligus juga tetap menjaga kesehatan agraris sebagai sumber daya alam agar dapat memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Jadi satu sisi senada dengan kapitalisme dan sisi lainnya bersepakat dengan sosialisme.

Sepintas, NU tampak tidak memiliki prinsip nalar yang jelas. Namun jika dipahami lebih mendalam, posisi ini tampak menjelaskan mereka tidak berada pada kelompok mana pun. Secara paradigmatis, tentu ada prinsip nalar yang dipegang. Dasar tentu masih berkaitan dengan prinsip-prinsip yang telah disusun sebagai *manhaj Ahl al Sunnah wa al Jama'ah*. Sebagaimana dikemukakan di awal, bahwa manhaj NU terdiri dari prinsip *tawazzun, tawasuth* dan *tasammuh*. Ketiganya merupakan jalan menuju pengembangan masyarakat yang berkeadilan. Pada sektor ini, prinsip-prinsip demikian mestinya juga dapat dihadirkan sebagai jalan untuk mencapai perekonomian yang sejahtera dan adil.

Nalar NU yang di waktu dan tempat tertentu menolak dan dikondisi lain menerima, didasarkan pada prinsip paradigmatis yang berasal dari kepercayaan dan persepsi nalar metodis rasionalnya. Jadi ketika nalar mereka menolak nalar kapitalisme, bukan berarti mereka berada pada sisi sosialisme. Sebaliknya, ketika menolak sosial, mereka tidak berada pada sisi kapitalisme. Mereka memiliki dasar yang jika dilanggar, secara rasional mereka akan melakukan kontra nalar pada kelompok pelanggarnya. Hal demikian ini terlihat pada fakta historis yang disajikan sebelumnya. Agar mudah dipahami, lihat kerangka nalar di bawah ini;

Gambar 2.1 *Manhaj al Iqtishod* NU dalam relasi Manusia dan Alam (Ekologi)



Gambar di atas memperlihatkan sejumlah prinsip paradigma aswaja di tubuh NU dalam hal relasi manusia dan alam. Sepintas nalar di atas memiliki kesamaan dengan *matabolic rift* Marxisme. NU memosikan alam tidak hanya sebagai sumber ekonomi, namun juga makhluk yang memiliki hak untuk tumbuh bahkan memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri. Perbedaannya adalah dasar keyakinan terhadap kesetaraan sesama makhluk tidak hanya sebatas pertimbangan rasional masa depan metobolisme alam. Mereka menghadirkan refleksi keTuhanan sebagai nalar ekologinya. Nalar ini oleh beberapa pakar disebut sebagai "*ecotheology*" (Nafia, 2021) bahkan beberapa menyebutnya sebagai eco-sufisme (Imamah, 2017).

Apa pun penamaannya, dasar nalar yang dikembangkan tidak lepas dari refleksi ajaran Islam tentang kesadaran hubungan manusia dengan alam (*hablun min al 'alam*) (Saepudin, 2021). Walaupun ada yang menyebutnya sebagai gagasan *post-sosialism* (Imam & Baijuri, 2023), istilah tersebut tentu masih bisa diterima. Walaupun dianggap mengembang ide sosialisme, namun sebagai post nalarnya, tentu merupakan kontra dari pemikiran murni sosialisme sendiri. Begitu pun sebaliknya, walaupun dianggap sama dengan nalar ekologi kapitalisme, namun sebenarnya merupakan *post-capitalism* itu sendiri.

Garis besar dari *manhaj Iqtishod* NU yang dikembangkan pada ruang relasi manusia dan alam sebenarnya ada pada titik pemosisian kembali subjek dan kepentingan metabolisme ekonomi. NU mendorong pertimbangan berdasar pada prinsip keseimbangan, moderatif dan toleransi sesama makhluk Tuhan. Prinsipprinsip berperan sebagai kontrol dan nilai pengembangan ekonomi apapun bentuknya. Mau pengembangan kapitalisme atau sosialisme, hal terpenting yang perlu dijadikan dasar adalah pertimbangan rasional dan etis keseimbangan,

tidak berlebihan dalam melakukan penyerapan dan pertimbangan kepentingan kesehatan agraria sebagai batasan.

b. Manhaj al Iqtishod dalam Hubungan Manusia dan sesamanya

Selain hubungan manusia dengan alam, tentu yang paling penting juga didiskusikan adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Proses ekonomi tidak hanya terjadi pada relasi manusia dan alam, namun juga dalam berkaitan pada aspek keniscayaan sosialnya sendiri. Pada sisi ini, berikatan dengan cara dan sisi sosial politik manusia. Sebagaimana dijelaskan di awal, dalam dikursus sosial ekonomi, ada banyak dinamika perdebatan nalar yang terjadi, seperti kebebasan pasar, intervensi kuas negara, kemiskinan, legalitas kepemilikan dan semacamnya. Secara paradigmatis, dari temuan fakta historis, NU kadang bersikap sama dengan kapitalisme dan kadang juga menolaknya sebagai sistem sosial. Begitu pun dengan sosialisme, juga terlihat berseberangan dan beberapa sisi memiliki kesamaan.

Upaya politik ekonomi selalu terjadi dalam interaksi sesama manusia. Politik ekonomi ini tentu orientasinya adalah upaya pengembangan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat secara sosiologis. Baik kapitalisme maupun sosialisme, basis nalarnya pada sektor sebenarnya adalah dinamika distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan diperdebatkan sebab alurnya tidak pernah stabil, sehingga menyebabkan masyarakat terpisah menjadi kelompok kaya dan miskin. Masalah menimbulkan tanggapan yang berbeda dari dua aliran besar ekonomi yang berkontestasi hingga saat ini. Bagi kapitalisme, kemiskinan dan kekayaan terjadi secara alamiah. Untuk menghindarinya setiap orang harus bekerja keras. Gagasan ini menjadi dasar untuk menolak intervensi pemerintah. Bebaskan pasar, agar masyarakat dapat semangat bekerja, dengan demikian stabilitas ekonomi akan stabil pada sendirinya (Smith, 2018).

Kebebasan pasar atas intervensi pemerintah tampak tidak terbukti melahirkan stabilitas ekonomi. Malah beberapa kali gagasan ini rapuh karena menyebabkan krisis yang tidak dapat dikontrol oleh negara. Salah satu contoh sebagai yang terjadi pada era Franklin Delano Roosevelt di USA. Pada kepemimpinannya ada kebijakan privitisasi BUMN, namun tidak dapat tetap tidak dapat menyelesaikan krisis. Liberalisasi ekonomi tetap membuat masyarakat terpuruk dan kehilangan aktor pembedayaannya(Fakih, 2005).

Sedangkan bagi sosialisme, kemiskinan terjadi karena relasi masyarakat yang tidak sehat. Ada kelompok borjuis atau pemilik modal yang sengaja mendiskriminasi kelompok proletar. Pada kondisi tersebut, menurut perlu menghadirkan kembali nagara sebagai pengontrol dan tata konsensus pasar yang berkeadilan. Nalar demikian, akhirnya juga runtuh sebab juga melahirkan krisis ekonomi. Intervensi negara yang teramat kuat mematikan aspek inovasi mikro dan hak privat masyarakat dalam ekonomi pasar. Akibat daya masyarakat tak dapat dikembangkan (Lenin, 1964).

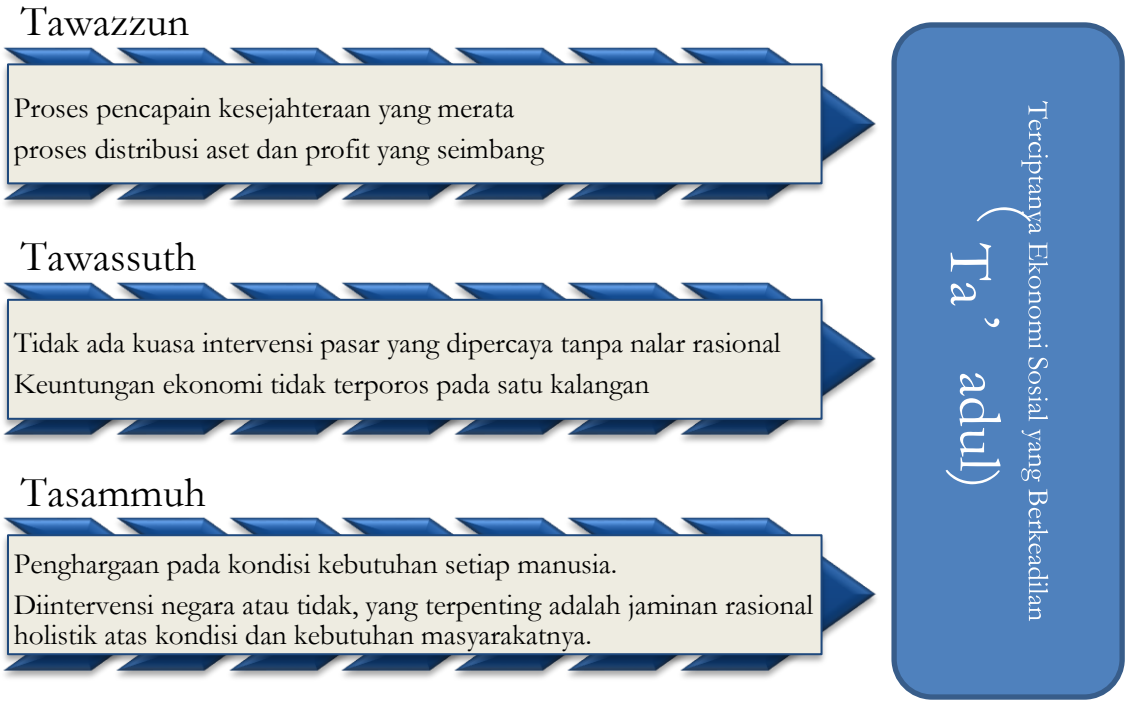
Dilematik kedua nalar ini juga hadir dan berkaitan dalam sejarah pengembangan ekonomi di Indonesia. Seluruh aliran masuk ke Indonesia, dan sepanjang penulisan kajian historis NU berseberangan dan satu menerima gagasan kedua aliran tersebut. NU

sepakat, jika negara juga mengambil porsi intervensi pada gerak pasar, namun tidak tetap ada batasan, yakni pertimbangan kepentingan ekonomi mikro itu sendiri. Ide kapitalisme tentang naturalisme pasar dianggap sesuai dengan semangat ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk selalu bekerja keras. Islam menghargai setiap kerja keras dan bahkan memasukkan kepemilikan kapital di pasar sebagai salah instrumen perjuangan agama juga (Rodinson, 2007).

Pada gagasan NU juga secara nalar ada kesamaan. Sebab beberapa juga memiliki kesamaan dengan nalar *fiqh siyasah* dalam ajaran Islam. Pemerintah oleh NU dianggap sebagai kelembagaan sosial yang memiliki tanggung jawab pada kesejahteraan rakyat. pemerintah diakui secara syara' dalam mengelola harta rakyat. Sedangkan harta dalam Islam ada yang berjenis *al-milkiyah ad-dawlah.* Harta tersebut tentu harus dimanfaatkan, entah sebagai *tanmiyat al-milkiyah* atau *infaq al mal.* Yang terpenting, harus *tauzi'ut sarwah bayna al-nâs* yang artinya terdistrubusikan dengan baik di tengah-tengah manusia (An-Nabhani, 1996). Pada aspek *tauzi'ut sarwah bayna al-nâs*, pemerintah bertugas mendistribusikan harta secara adil dan merata. Tentunya hal demikian harus disesuaikan dengan nilai-nilai orientatif *al-tasharruf fi al-milkiyah* sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam(Afzalurrahman, 2002).

Jadi sama dengan pembahasan sebelumnya, sepintas *manhaj al iqtishod* NU tidak memiliki prinsip yang jelas. Seperti pembahasan di sub relasi manusia dengan alam, nalar NU akan jelas dipahami jika menghadirkan konsep prinsip yang selama ini dikembangkan. Nalar kebijakan NU di tengah konstestasi global ekonomi, tetap berpijak pada prinsip *tawazzun, tawassuth* dan *tasammuh*. Ketiga konsep ini pada sebagai *manhaj al iqtishod* sangat penting dalam membangun ekonomi yang berkeadilan. Untuk memperjelasnya, lihatlah kerangka nalar di bawah ini,

Gambar 2.2 *Manhaj al Iqtishod* NU dalam relasi Manusia dan Sesamanya (Ekonomi Politik)



Berdasarkan penjelasan di atas, pola *manhaj al iqtishod* NU tidak berhubungan dengan kontestasi gagasan kapitalisme dan sosialisme. Tidak pada perdebatan antara yang sepakat dan tidak pada intervensi pemerintah. NU tidak sepakat pada intervensi pemerintah, jika tidak rasional disusun dilakukan. Misalnya pada kenaikan harga BBM yang tidak ketetapan harga dan kemampuan pendapatan masyarakat. Sehingga, intervensi pemerintah tidak tepat jika hanya mengintervensi harga. NU akan mendorong pemerintah hadir pada penguatan pendapatan dengan cara memberikan bantuan atau subsidi. Dalam hal ini, NU sepakat pada intervensi negara dengan syarat tampil sebagai penguatan keseimbangan pendapatan kerja masyarakat dengan beban kebutuhan mereka.

Manhaj al iqtishod NU juga tidak sama dengan apa yang diperjuangkan oleh kelompok sosialisme. Ekonomi sosialisme menghilangkan hak *private* ekonomi di pasar. Nalarnya menyepakati adanya intervensi negara pada kegiatan pasar. Proses ekonomi tidak akan menyejahterakan, jika tidak diatur oleh lembaga yang berwenang. Butuh *fiscal*, *monetar* dan *industrial policyv* (Tomlinson, 2002). Nalar NU tidak bersepakat pada ide intervensi mutlak negara pada ekonomi rakyat demikian. Negara hadir tidak untuk mengatur dan membatasi hak ekonomi masyarakat. Namun negara hadir untuk mendukung gerak ekonomi. Penolakan ini tentu karena NU mempertimbangkan kesalahan dan kepentingan monopoli negara yang cenderung melahirkan nepotisme dan diskriminasi.

Tindakan demikian sering menjadi dasar *positioning* kebijakan dan langkah kelembagaan NU di tengah kontestasi ekonomi global. Satu sisi senada dengan kapitalisme serta sosialisme, dan di sisi lain tampak sekaligus berseberangan. Prinsip tindakan yang dikembangkan terlihat mendorong adanya revolusi kedua sistem yang sedang bersengketa tersebut. Melalui *manhaj* aswaja, NU bisa saja dianggap sebagai

postsosialism dan sekaligus *post-capitalism* (Imam & Baijuri, 2023). Sebagai *postsocialism*, NU bersepakat pada konsensus etis ekonomi rasional, namun tetap mengindahkan sistem demokrasi murni dan bebas tanpa intervensi negara sebagaimana kapitalisme. Artinya menguatkan peran pemerintah, namun tetap menjaga kemerdekaan hak pencapaian kebutuhan manusia. Salah satunya, mendukung gagasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bunce, *given way to more liberalized orders* (Bunce, 1999).

Juga dapat dianggap sebagai *post-capitalism* sebagaimana gagasan Massimo Des Angels. Ia menjelaskan adanya globalisasi membuat kapitalisme perlu dipimpin oleh komunal lokal dan menyusun *omnia sunt communia*. Artinya, perlu adanya serikat atas kepentingan etis dan kebutuhan bersama. Pemerintah tidak dianggap perlu ikut campur dalam arus gerak ekonomi, namun perlu tampil untuk mendorong adanya konsensus kebutuhan bersama yang lebih holistis(Angelis, 2017). Apapun penemaan *manhaj al iqtishod* NU ini, secara garis besar berdasar pada resapan prinsip *ahl al sunnah wa al jama'ah* yang dikembangkan secara metodis.

D. Simpulan

Konklusi penelitian ini menemukan konsep *manhaj al iqtishod* NU yang terdiri dari prinsip *tawazzun, tawassuth* dan *tasammuh*. Ketiganya merupakan jalan proses pencapaian dan penjaminan terciptanya ekonomi yang berkeadilan. Berdasar pada kajian fakta historis beberapa pakar, NU secara konsisten hadir sebagai lembaga keagamaan yang memiliki prinsip baik dalam hal hubungan ekonomi manusia, alam maupun dengan sesamanya. Walaupun NU terkesan dilematik, karena satu sisi dan sisi lainnya menerima gagasan kapitalisme sekaligus sosialisme, namun nalar prinsip, NU sebenarnya memiliki jalan alternatif paradigma ekonomi yang baik.

Daftar Rujukan

Afzalurrahman. (2002). *Doktrin Ekonomi: Vol. Jilid II*. PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Ahmad, N. (2019). Indonesian Islam during the Reign of Colonialism (1600-1942): An Historical Account of Challenges and Responses towards the Dutch Policies (Islam Indonesia di Zaman Penjajahan (1600-1942): Cabaran dan Tindak Balas terhadap Dasar Belanda). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 22898077)*, *16*(1), 237–257.

Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2021). The Contribution of the Western World to the Islamic Economy in Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, *13*(2), 153–170.

Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). *SPIRIT NAHDLATUT TUJJAR: Gerakan Sosial NU Membangun Ekonomi Syari'ah*. Penerbit NEM.

Angelis, M. D. (2017). *Omnia Sunt Communia: On the Commons and the Transformation to Postcapitalism*. Bloomsbury Publishing.

An-Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti.

Arizona, Y. (2019). The Return of Pancasila: Political and Legal Rhetoric against Transnational Islamist Imposition. *Constitutional Review (Consrev)*, *5*, 164.

Brown, G. (2019). Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia. *Asian Studies Review*, *43*(3), 397–414.

Bruinessen, M. van. (1994). *NU ; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. LKIS.

Bunce, V. (1999). The Political Economy of Postsocialism. *Slavic Review*, *58*(4), 756–793.

Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Callaway, H. G. (2019). *Globalization, Hamilton and Lodge, Retrospect and Prospects* [Thesis]. Temple University.

Cavanagh, J., & Mander, J. (Ed.). (2004). *Alternatives to Economic Globalization: A Better World Is Possible* (2nd edition). Berrett-Koehler Publishers.

Cholid, N. (2021). *PENDIDIKAN Ke-NU-an KONSEPSI AHLUSSUNNAH WALJAMAAH ANNAHDLIYAH*. CV Presisi Cipta Media.

Cleopatra, M. (2021). Penerapan Model Waterfall Dalam Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Ekonomi Nahdlatul Ulama. *Liaison Journal of Engineering*, *1*(01), 45–51.

Damm, M. (2018). The (Trans)formation of Religious Capital in Indonesian Politics During New Order Era: A Case Study Of Nahdlatul Ulama. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, *8*, 144–158. https://doi.org/10.14203/jissh.v8i2.96

Esha, M. I. (2015). *Peran Strategis Nahdlatul Ulama di Era Kenusantaraan Global* (M. I. Esha, Ed.; Vol. 1, hlm. 37–54). UIN-Maliki Press.

Fadlullah, M. E. (2018). Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Dalam Perspektif Said Aqil Siradj. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(1), 33–43.

Fakih, M. (2005). *Bebas Dari Neoliberalisme*. INSIST Press.

Farid, H. (2005). Indonesia's original sin: Mass killings and capitalist expansion, 1965–66. *Inter-Asia Cultural Studies*, *6*(1), 3–16.

Fealy, G., & Bush, R. (2014). The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama. *Asian Journal of Social Science*, *42*(5), 536–560.

Fealy, G., & McGregor, K. (2010). Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance. *Indonesia*, *89*, 37–60.

Fealy, G., & McGregor, K. (2012). *East Java and the Role of Nahdlatul Ulama in the 1965-66 Anti-communist Violence*. NUS Press - National University of Singapore.

Foster, J. B. (2000). *Marx's Ecology: Materialism and Nature*. Monthly Review Press.

Foster, J. B. (2002). *Ecology Against Capitalism*. NYU Press.

Fridiyanto, Amrullah, M. K., & Rifa'i, M. (2020). Digitalisasi Nahdlatul Ulama: Dari Laku Tradisional menuju Revolusi Digital. *AD-DHUHA : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Budaya Islam*, *1*(1), 59–67.

Habiburrahman, H. (2019). Islam dan Kapitalisme; Titik Temu dan Kritik Dalam AlQur'an. *Indonesian Journal of Religion and Society*, *1*(1), 38–50.

Hadiz, V. R., & Teik, K. B. (2011). Approaching Islam and politics from political economy: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *The Pacific Review*, *24*(4), 463–485.

Haikal, H., & Habibi, A. (2019). Upaya Preventif Kyai, Pengurus dan Santri terhadap Paham Radikalisme di Pondok Pesantren Al-Bidayah. *Fenomena*, *18*(1), 340080.

Hamzah, M., Sukawi, Z., Kholik, Asmaji, Siddiq, N., Mahfudz, & Dkk. (2017). *Pengantar studi Aswaja an-Nahdliyah*. LKiS.

Hanafi, Hasan. (2004). *Islamologi 3: Dari Teosentrisme ke Antroposentrisme | Perpustakaan Komnas Perempuan*. LKIS.

Hatta, M. (2019). *The Co-operative Movement in Indonesia*. Cornell University Press.

Hearman, V. (2018). *Unmarked Graves: Death and Survival in the Anti-Communist Violence in East Java, Indonesia*. NUS Press.

Heo, A. (2021). The Christian Right and Refugee Rights: The Border Politics of Anticommunism and Anti-discrimination in South Korea. *Religion and Society*, *12*(1), 86–101.

Hidayat, A. A., Nurjaman, A., Ahmad, J., Witro, D., & Alghani, R. (2022). Nahdlatul Ulama In Facing The Guided Democracy 1959-1965: An Overview Of Social And Political Factors. *Jurnal Lektur Keagamaan*, *20*(2), 567–598.

Hilmy, M. (2020). The rise and fall of "transnational" Islam in Indonesia: The future of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam *Rising Islamic Conservatism in Indonesia* (hlm. 13). Routledge.

Hornbacher-Schönleber, S. (2021). *Preaching Marxism? : The politics and ethics of Leftist Muslim activists in Java* [Ph.D., University of Cambridge]. https://doi.org/10.17863/CAM.72653

Huda, C. (2016). EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1), Art. 1.

Imam, M., & Baijuri. (2023). *Manisfesto Gerakan PMII; Positioning PMII Jawa Timur Mengahadapi Kontestasi Global*. LKiS.

Imamah, F. M. (2017). Menghadapi Kapitalisme: Pendekatan Eco-Sufism Dalam Gerakan Environmentalisme Islam Indonesia. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *5*(1), 109–135.

Irawan, R. A. (2016). Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, *11*(1), 149–162.

Jaringan Komisi Fatwa. (2004). *Sekilas Nahdlatut Tujjar*. Pustaka Pesantren.

Kasdi, A. (2018). Islamic Dialectics and Culture in Establishing Islam Nusantara Paradigm: Variety Model of Islam Nusantara for Indonesia. *Addin*, *12*(2), 299–324.

Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLOS ONE*, *17*(9), e0275113.

Khitam, H. (2022). Islam And Capitalism: The Dynamics Of Religion And Contemporary Indonesian Work Orientation. *Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, *19*(1), 53–74.

Khoiri, N. (2018). *Kapitalisme kaum santri: Respon terhadap hegemoni pengusaha asing*.

Laclau, E. (2012). *Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism*. Verso Books.

Lenin, V. I. (1964). *Collected Works* (Vol. 32). Progress Publishers.

Lerner, R. E. (1998). *Western Civilizations: Their History and Their Culture*. W W Norton & Co, Inc.

Luthfi, A. (2011). Etika Islam dan Semangat Kapitalisme. *Substansia: jurnal ilmiah falsafah dan agama*, *2 no. 1*, 33-46.

Luthfi, A. N. (2017). Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, *3*(2), Art. 2.

Makin, A. (2017). *2.03 Haji Omar Said Tjokroaminoto: Islam and Socialism (Indonesia, 1924/1963)* (hlm. 249–264). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004329003_021

McGregor, E. K. (2009). Confronting the Past in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, *41*(2), 195–224.

Mudhoffir, A. M., & Hadiz, V. R. (2021). Indonesia's "Third-wave" Democratic Model? Dalam *Routledge Handbook of Illiberalism*. Routledge.

Mulkhan, A. M. (2020). *Teologi Kiri*. IRCISOD.

Nafia, M. Z. I. (2021). *Gerakan Ekoteologi dalam Organisasi Masyarakat Keagamaan Nahdlatul Ulama: Studi Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)* [Undergraduate]. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nasir, M. M., & Ahmad, A. (2022). Articulation of Syaikhona Mohammad Kholil's Staff in Nahdlatul Ulama's Management. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, *3*(1), 65–81.

Nazar, R. F., & Hamid, M. F. A. (2022). Tracking the Genealogical Reasoning Reconstruction of Nahdlatul Ulama (NU) Fiqh: From 'Social Fiqh' to 'Civilization Fiqh.' *Tashwirul Afkar*, *41*(2), 137–162.

Osman, M. N. M. (2018). *Hizbut Tahrir Indonesia and Political Islam: Identity, Ideology and Religio-Political Mobilization*. Routledge.

PBNU. (2022). Hasil Muktamar NU Tahun 2022. *Bahtsul Masail NU Tahun 2022*.

Rand, A., Branden, N., Greenspan, A., & Hessen, R. (1986). *Capitalism: The Unknown Ideal* (Reissue edition). Signet.

Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present*. NUS Press.

Ridwan, N. K. (2008). *NU dan Neoliberalisme ; Tantangan dan Harapan Menyongsong Satu Abad*. Lkis Pelangi Aksara.

Ridwan, N. K. (2018). *Negara Bukan-Bukan*. IRCiSoD.

Roberts, A., & Lamp, N. (2021). *Six Faces of Globalization: Who Wins, Who Loses, and Why It Matters*. Harvard University Press.

Rodinson, M. (2007). *Islam and Capitalism*. Saqi Books.

Rofi'i, A. F., Rochwulaningsih, Y., & Alamsyah, A. (2022). Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967. *IHiS (Indonesian Historical Studies)*, *6*(1), 78–93.

Saepudin, W. (2021). The Role of the Front Nahdliyin to Support Sovereignty over Natural Resources: Hadith Reception on Ecology. *Jurnal Living Hadis*, *6*(1), Art. 1.

Saito, K. (2017). *Karl Marx's Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*. NYU Press.

Saraswati, I., & Trilaksana, A. (2019). Perkembangan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama' Cabang Bangil Bidang Kesehatan Tahun 19652015. *Avatara*, *7*(1), Art. 1.

Setia, P., & Iqbal, A. M. (2021). Adaptasi Media Sosial oleh Organisasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kanal YouTube Nahdlatul Ulama, NU Channel. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *11*(2), 359–378.

Setiawan, A., & Setyorini, T. (2022). The Role of the Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institutions of Nahdlatul Ulama (LAZISNU) towards Harakah Nahdliyyah. *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*, *6*(1), 76–89.

Siddiq, I. H. A., & Widianto, A. A. (2019). PEMUDA NU DALAM PUSARAN WACANA ANTI KOMUNISME: Sebuah Pergolakan Ideologi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *13*(2), 257–276.

Smith, A. (2018). *The Wealth of Nations*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Soleh, M. (2020). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, *1*(1), Art. 1.

Steger, M. B. (2020). *Globalization: A Very Short Introduction* (5th edition). Oxford University Press.

Sugita, A., Hidayat, A. R., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *1*(01), 9–18.

Sutisna, D. (2018). Komunikasi Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*, *2*(1), 19–38.

Suwangsit, & Wathoni, S. (2020). Pemberdayaan Umat Di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Ponorogo (Studi Atas Bintang Swalayan). *Journal of Community Development and Disaster Management*, *2*(1), 49–61.

Tashwirul Afkar. (2009). *Ekonomi NU: Mengembalikan Spirit Nahdlatut Tujjar*. LAKPESDAM - PBNU.

Thohir, U. (2020, Februari 4). *The Enthusiasm of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Ideology in the Perspective of Post-Modern Ethics*. Proceedings of the 19th Annual International Conference on Islamic Studies, AICIS 2019, 1-4 October 2019, Jakarta, Indonesia.

Tomlinson, J. (2002). *Democratic Socialism and Economic Policy: The Attlee Years, 1945-1951*. Cambridge University Press.

Ubaidillah, M. (2018). Wajah Baru Kiri Islam: Studi Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *6*(2), 251–270.

Usman, M. I. (2018). Nahdlatul Ulama dan Kedaulatan Nation-State Indonesia. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, *5*(02), 167–192.

Wadipalapa, R. (2021a). Countering the Communist Imaginary: The Role of Nahdlatul Ulama in Indonesia's 2014 and 2019 Presidential Elections. *Contemporary Southeast Asia*, *43*(3), 557–584.

Wadipalapa, R. (2021b). Countering the Communist Imaginary: The Role of Nahdlatul Ulama in Indonesia's 2014 and 2019 Presidential Elections. *Contemporary Southeast Asia*, *43*(3), 557–584.

Waters, M. (2000). *Globalization*. Routledge.

Widayati, A., & Suparjan. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, *5*(1), Art. 1.

Wydra, H. (2007). *Communism and the Emergence of Democracy*. Cambridge University Press.